

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku dan Jurnal

- Anggraini, Jum, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Arto, Mukti, 1996, *Praktek Perkara Pedata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Basah, Sjachrab, 1985, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Budiman, Arief, 1996, *Teori Negara; Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dewi, Gemala, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Djubaidah, Neng, 2012, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta.
- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus dkk, 1997, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Harahap, M. Yahya, 1993, *Beberapa Permasalahan Hukum Acara Pada Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 1993, *kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Harahap, Zairin, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Cetakan kesembilan, Jakarta.

Hermansyah, Despan, 2017, *Pergeseran Kompetensi Absolut PTUN dalam Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Hukum Novelty*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

HS, Salim dan Nurbani, Erlis Septiana, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Koentjoro, Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Marbun, SF, 2013, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Praag, Van, 1950, *Algemeine Nederland Administratief Recht*.

Prins, WF, 1975, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Andalusia, Jakarta.

Rasyid, Roihan A, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Rajawali Press, Jakarta.

Soehino, 2000, *Asas asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, & Tjitrosoedibio, 1971, Pradya Paramita, *Kamus Hukum*, Jakarta.

Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Tjandra, W. Riawan, 2014, *Teori & Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, cetakan kelima, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Utrecht, E, 1957, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, NV Penerbitan dan Balai Buku Indonesia, Cetakan. II, Jakarta.

## **b. Kamus dan Jurnal Hukum**

*Kamus hukum*, 2008, Citra Umbara, Bandung.

Julian Noor, Hendry dan Herman, 2017, *Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (BESCHIKKING)*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Yogyakarta.

Ninik Rahayu, 2013, *Politik Hukum Itsbat Nikah*, Komisi Komnas Perempuan, Sub Komisi Reformasi Hukum dan Kebijakan

## **c. Perundang Undangan**

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75.

Undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

Undang – undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3344.

Undang – undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079.

Undang – undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang – undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang – undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang – undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013, Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (buku I).

#### **d. Karya Ilmiah**

Ike Wisnu Wijayanti, 2014, “Pembatalan Perkawinan dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Undang – Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor : 799/Pdt.G/2006/PA.Klt)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Wahid Abdur Rokhim,2018, “Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Analisis Terhadap Putusan PTUN Yogyakarta Tahun 2015-2017)”, *Tesis*, Program Study Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Arpan Marwasih NS, S.H., 2018, “Konsekwensi Yuridis Undang – undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Terhadap Kompetensi Absolut PTUN”, *Tesis*, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sebastian Pompe, 2005, *A Summary of A.W. Jongbloed's piece on Judicial Liability (Aansprakelijkheid voor optreden van de rechterlijkemacht*, Den Haag, BoomJuridische Uitgevers 1999) yang dipresentasikan pada diskusi mengenai *judicial liability* oleh Komisi Yudisial-NLRP pada tanggal 12 Mei 2010.

Sebastian Pompe, 2005, *A Summary of A.W. Jongbloed's piece on Judicial Liability (Aansprakelijkheid voor optreden van de rechterlijkemacht*, Den Haag, BoomJuridische Uitgevers 1999) yang dipresentasikan pada diskusi mengenai *judicial liability* oleh Komisi Yudisial-NLRP pada tanggal 12 Mei 2010.

#### e. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 069/G/2016/PTUN

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 132/B/2017/PT.TUN.SBY

Putusan Pengadilan Agama Magelang No. 0269/Pdt.G/2014/PA.Mgl

#### f. Internet

“Latar Belakan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)”, [https://ptun-jakarta.go.id/?page\\_id=14](https://ptun-jakarta.go.id/?page_id=14), diakses pada tanggal 21 Desember 2018.



“Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (The Absolut Competence of Administrative Court Based on Law Number 30 of 2014 Concerning Government Administration)”, <https://www.researchgate.net/publication/317568002> KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM KONTEKS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN The Absolut Competence of Administrative Court Based on Law Number 30, diakses pada 25 Januari 2019.